

© 2004 Jelamu Ardu Marius
Makalah pribadi
Pengantar ke Falsafah Sains (PPS702)
Sekolah Pasca Sarjana / S3
Institut Pertanian Bogor
April 2004

Posted 22 April 2004

Dosen:
Prof. Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng
Prof. Dr. Ir. Zahrial Coto
Dr. Ir. Hardjanto

MEMECAHKAN MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA

Oleh:

Jelamu Ardu Marius

NRM : P061030091
jelamu_ardu@yahoo.com

I. Pendahuluan

Kwik Kian Gie¹, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Ketua Bappenas) mengemukakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah adalah terus membesarnya jumlah pengangguran. Data tahun 2002 menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Jumlah ini dua kali lipat lebih dari jumlah pengangguran terbuka sebesar 4,3 juta jiwa atau 4,86 persen tahun 1996, atau setahun sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Data itu, menurut Kwik, belum termasuk setengah penganggur yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang jumlahnya mencapai 28,9 juta orang pada tahun 2002. Data pengangguran yang mengacu pada Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan riil yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu. Keraguan terhadap data BPS itu dikemukakan oleh Faisal

¹ Dikemukakan Kwik pada seminar "Pasar Kerja yang Ramah Pasar" di Hotel Borobudur Jakarta, 9 September 2003.

Basri², ahli ekonomi dari Universitas Indonesia dengan mengacu pada ‘rumus’ standar yang sudah lama dijadikan acuan untuk menghitung jumlah pengangguran terbuka (open unemployment), yakni setiap pertumbuhan ekonomi satu persen akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja 400.00 orang. Hal itu berarti, jika tahun 1997 jumlah penganggur sebesar 4,2 juta orang, dengan pertumbuhan ekonomi kumulatif tahun 1998-2003 yang hanya 2,4 %, berarti daya serapnya hanya 960.000 pekerja baru. Sementara itu, tambahan pekerja baru setiap tahunnya mencapai 2,5 juta orang, sehingga selama periode 1998-2003, jumlah penganggur adalah 15 juta orang. Sehingga menurut Basri, jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2003 adalah 18,2 juta orang (4,2 juta ditambah 15 juta dikurangi 960.000). Ada suatu pertanyaan yang menarik dari ahli ekonomi UI ini yang sekaligus dijawabnya sendiri, yakni mengapa kita peduli terhadap angka-angka tersebut? Pertama, angka yang kurang akurat tidak akan menghasilkan perumusan kebijakan yang tajam dan langkah-langkah penanganan yang saksama. Kedua, masalah pengangguran berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik yang pada gilirannya akan memukul balik kestabilan makro-ekonomi³ yang telah dicapai dengan susah payah.

Apa yang dikhawatirkan oleh Faisal Basri terutama jawabannya yang kedua dimana masalah pengangguran berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan politik, merupakan kekhawatiran kita bersama. Dampak negatif dari masalah pengangguran seperti beragamnya tindakan kriminal, anak jalanan, pengemis, prostitusi, perdagangan anak, aborsi, pengamen dan sebagainya sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus kanker yang sulit diberantas. Penyakit sosial ini sangat berbahaya dan menghasilkan korban-korban sosial yang tidak ternilai. Menurunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial ini sudah sangat merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan yang beradab. Karena itu persoalan pengangguran ini harus secepatnya dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya yang terbaik. Tentunya menghilangkan pengangguran dalam situasi kehidupan ekonomi Bangsa yang sedang morat-marit ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi upaya mengurangi pengangguran bukanlah hal yang mustahil. Cara yang realistis dalam jangka pendek mengurangi pengangguran adalah memberdayakan sektor informal, padat karya dll disamping strategi jangka panjang seperti pemerataan wilayah pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan desentralisasi.

II. Gambaran Pengangguran di Indonesia (analisis pohon masalah)

Sebelum kita menganalisis masalah pengangguran di Indonesia dengan menggunakan analisis pohon masalah terlebih dahulu dikemukakan gambaran

² Analisis Ekonomi Faisal Basri, Kompas, 21 Juli 2003, halaman 1 dan 11.

³ Kestabilan makro ekonomi terwujud dalam beberapa indikator seperti adanya stabilitas moneter, menurunnya inflasi dan menurunnya bunga Bank. Tentu masih ada indikator lain seperti daya saing, hidunya sektor riil, arus ekspor impor yang normal dan lancar dan sebagainya.

pengangguran di Indonesia. Bappenas⁴ memperkirakan pada tahun 2004 jumlah angkatan kerja akan mencapai 102,88 juta orang termasuk angkatan kerja baru 2,10 juta orang. Tambahan lapangan kerja yang tercipta hanya 10,83 juta orang. Penciptaan lapangan kerja yang tak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru itu menyebabkan angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi 10,83 juta orang (10,32 % dari angkatan kerja), dari tahun sebelumnya 10,13 juta orang (9,85 % dari angkatan kerja). Peningkatan pengangguran terbuka ini akan terus berlanjut tahun 2005 dimana angka pengangguran terbuka diproyeksikan menjadi 11,19 juta orang atau 10,45 % dari angkatan kerja. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2004 dan 2005 masing-masing 4,49 % dan 5,03%. Menurut Kwik Kian Gie⁵, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 4,49% (tahun 2004) dan 5,03% (tahun 2005) samasekali tidak menjamin terbukanya lapangan kerja. Tantangan utama pemerintah sekaligus bangsa Indonesia adalah terus menerus jumlah pengangguran seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Struktur Angkatan Kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2002

Tkt Pendidikan	Struktur angkatan kerja		Struktur pekerja		Struktur pengangguran terbuka	
	Juta	%	Juta	%	Juta	%
SD dan SD ke bawah	59,05	58,6	55,84	60,9	3,22	35,3
SMTP	17,49	17,4	15,34	16,7	2,15	23,5
SMU	12,21	12,1	10,07	11,0	2,14	23,4
SMK	7,12	7,1	6,02	6,6	1,11	12,2
Diploma/akademi	2,21	2,2	1,96	2,1	0,25	2,7
Universitas	2,69	2,7	2,42	2,6	0,26	2,8
Jumlah	100,77	100,0	91,65		9,13	100,0
			100,0			

Sumber : Sakernas BPS, 2002

Data tahun 2002 yang terlihat dari tabel di atas menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06% dari keseluruhan angkatan kerja. Jumlah ini dua kali lipat lebih dari jumlah pengangguran terbuka sebesar 4,3 juta jiwa atau 4,86 persen tahun 1996 setahun sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Data di atas belum termasuk setengah penganggur, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang jumlahnya 28,9 juta orang pada tahun 2002. Krisis ekonomi ditambah dengan krisis moral para penyelenggara Negara dengan maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menghambat pertumbuhan ekonomi yang justru akan memungkinkan terciptanya lapangan kerja. Supaya bisa menambah lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi harus bisa mencapai

⁴ Kompas, 10 September 2003.

⁵ Menteri Negara /Ketua Badan Perencanaan Nasional mengemukakan pada Seminar "Pasar Kerja yang Ramah Pasar", Kompas 10 September 2003.

enam atau tujuh persen yang bisa diperoleh dari investasi baru terutama dari investor asing. Untuk mencapai sangka enam atau tujuh persen sangat sulit karena kebanyakan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia karena biaya ekonominya sangat tinggi akibat masih kuatnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

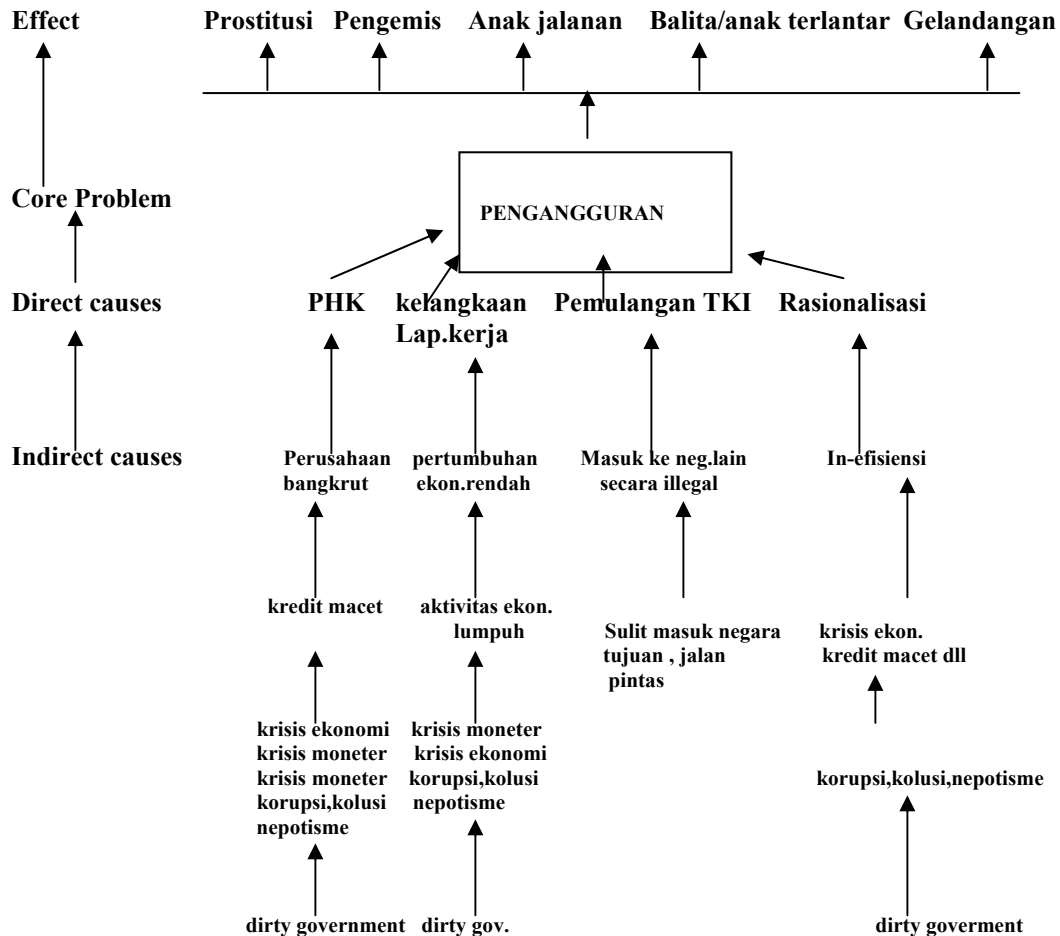
Data Tabel di atas juga menunjukkan struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan sekolah Dasar(SD) ke bawah. Untuk angkatan kerja tahun 2002 yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 59,05 juta orang atau sekitar 58,6 % dari angkatan kerja, diikuti SMTP 17,49 juta orang, SMU 12,21 juta orang dan seterusnya (lihat tabel). Struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka yang didominasi oleh manusia Indonesia yang berpendidikan rendah ini sangat rentan terhadap konflik sosial. Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial⁶ di tengah masyarakat

Pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan dan kemelaratan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan menjerumuskan sebagian besar manusia Indonesia ke jurang kemelaratan. Tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan ekonomi ini akan menciptakan masalah-masalah sosial yang lain seperti tindakan kejahatan(perampokan, pencurian, penodongan dll), prostitusi, jual beli anak, anak jalanan, anak putus sekolah dan sebagainya. Berbagai masalah sosial ini akan menjadi patologi sosial (penyakit masyarakat) yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial, moralitas dan pada akhirnya menciptakan dehumanisasi dan penghinaan terhadap martabat manusia (human dignity).

Setelah kita melihat sepintas gambaran pengangguran di Indonesia dengan sajian data yang riil, kita akan menganalisisnya dengan menggunakan pohon masalah (problem tree analysis) seperti yang tergambar berikut ini. Lihat halaman berikutnya...

Analisis Pohon Masalah (Problem Tree Analysis)

⁶ Berbagai konflik sosial dan konflik horisontal di Indonesia selama ini biasanya memobilisasi para penganggur dan pelaku kejahatan yang minim pendidikan. Mereka mudah dihasut, dipengaruhi dan dijadikan alat politik apalagi dengan mengeksploitasi agama atau etnik, atau kesenjangan sosial dan ekonomi. .



Note : Indirect causes masih bisa ditelusuri lebih lanjut sampai ke struktur yang lebih makro baik yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik. Semua variabel dalam analisis pohon masalah bersifat negatif

Dari analisis pohon masalah di atas memperlihatkan bahwa *core problem* (*inti persoalan*) yang menjadi isu utama Bangsa Indonesia adalah pengangguran. Ada beberapa sebab langsung (*direct causes*) terjadinya pengangguran besar-besaran di Indonesia yakni 1) terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, 2) Kelangkaan Lapangan Kerja, 3) Pemulangan TKI ke Indonesia, 4) Rasionalisasi karyawan dll. Sebab langsung ini pada saat yang sama menjadi akibat dari sebab-sebab yang lain. PHK disebabkan oleh perusahaan bangkrut. Perusahaan bangkrut disebabkan oleh karena kredit macet/tidak mampu mengangsur pinjaman Bank. Kredit macet disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda bangsa ini sejak tahun 1997. Krisis ekonomi disebabkan oleh krisis moneter (melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS). Krisis moneter disebabkan oleh rusaknya ekonomi Indonesia. Kerusakan ekonomi ini disebabkan oleh adanya mental korup, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita dan sistematis pada semua lembaga negara dan swasta. Budaya KKN ini disebabkan oleh pemerintahan yang kotor (tidak bersih). Masih bisa dicari lagi sebab-sebabnya misalnya dekadensi (kemerosotan moral),

tidak dihayatinya nilai-nilai agama, lemahnya penegakan hukum dll. Hal yang sama pada fenomena kelangkaan lapangan kerja sebagai penyebab langsung(direct cause) pengangguran. Kelangkaan lapangan kerja disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang rendah. Secara teoritik(perhitungan standar dalam ekonomi), setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja baru 400.000 orang. Pertumbuhan ekonomi yang rendah disebabkan oleh lumpuhnya aktivitas ekonomi (bubarinya pabrik-pabrik/perusahaan, lumpuhnya kegiatan ekspor-impor, melemahnya daya saing, kehilangan devisa, larinya investor dll). Lumpuhnya aktivitas ekonomi disebabkan oleh terjadinya krisis moneter, dan krisis moneter disebabkan oleh krisis ekonomi (ditambah lagi dengan krisis politik, moral, sosial). Krisis ekonomi disebabkan oleh mengguritanya KKN. Mengapa ada KKN? Karena pemerintahan yang kotor, tidak adanya penegakan hukum, melemahnya nilai-nilai moral dan agama dsb. Fenomena pemulangan TKI sebagai penyebab langsung dari pengangguran juga mengikuti logika sebab-akibat yang ada pada pohon masalah di atas. Ribuan TKI dari Malaysia yang beberapa waktu lalu dipulangkan ke Indonesia menambah jumlah pengangguran yang ada(direct cause/sebab langsung). Ada beberapa sebab yang tak langsung misalnya karena mereka masuk secara illegal dan tidak terdaftar di Kedutaan atau Konsulat RI di negara-negara tujuan TKI, atau keberadaan mereka dirasakan sebagai beban dan ancaman bagi tenaga kerja dalam negeri dll. Pertanyaan lanjut mengapa mereka masuk secara ilegal? Ada banyak jawaban misalnya karena persyaratan menjadi TKI sangat ketat, sulit memasuki negara tujuan karena itu mereka mengambil jalan pintas. Sebab-sebab ini bisa ditelusuri lagi. Mengapa mengambil jalan pintas? Sebabnya bisa karena terdesak oleh kondisi atau mental bangsa kita yang suka merentas dan cari gampang dan sebagainya.

Setelah melihat *core problem* atau inti masalah dan mencari sebab-sebabnya baik yang langsung maupun tidak langsung, kita mengkaji berbagai efek atau dampak dari pengangguran sebagai masalah utama itu yakni timbulnya berbagai persoalan sosial seperti prostitusi, pengemis, anak jalanan, anak/bayi terlantar, gelandangan, kejahatan-kejahatan sosial/berbagai tindakan kriminal dan sebagainya. Data riil di bawah ini menunjukkan bagaimana *side effect pengangguran* dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Tabel 3. Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia Tahun 2000 dan 2002

No	Jenis penyandang masalah sosial	Tahun 2000	Tahun 2003
1.	Balita terlantar	1.140.166 jiwa	1.178.824 jiwa
2.	Anak terlantar	3.244.144 jiwa	3.488.309 jiwa
3.	Anak korban tindakan kekerasan	10.424 jiwa	43.708 jiwa
4.	Anak nakal	161.506 jiwa	193.155 jiwa
5.	Anak jalanan	59.517 jiwa	94.674 jiwa
6.	Anak cacat	358.738 jiwa	367.520 jiwa
7.	Wanita rawan sosial ekonomi	1.360.263 jiwa	1.449.203 jiwa

8.	Wanita korban tindak kekerasan	10.392 jiwa	28.562 jiwa
9.	Lanjut usia terlantar	3.401.279 jiwa	3.504.212 jiwa
10.	Lanjut usia korban kekerasan	9.259 jiwa	10.727 jiwa
11	Penyandang cacat	1.548.005 jiwa	1.673.119 jiwa
12	Penyandang cacat eks penderita penyakit kronis	197.166 jiwa	215.543 jiwa
13	Tuna susila	73.037 jiwa	83.386 jiwa
14	Pengemis	23.375 jiwa	27.625 jiwa
15	Gelandangan	49.271 jiwa	57.669 jiwa
16	Bekas narapidana	94.797 jiwa	115.307 jiwa
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	17.729 jiwa	237.840 jiwa
18	Keluarga fakir miskin	13.411.743 jiwa	16.689.773 jiwa
19	Keluarga bermasalah sosial psikologis	131.743 kk	188.385 kk
20	Rumah tak layak huni	5.532.715 RT	5.165.056 RT
21	Penyandang HIV/AIDS		2.941 jiwa

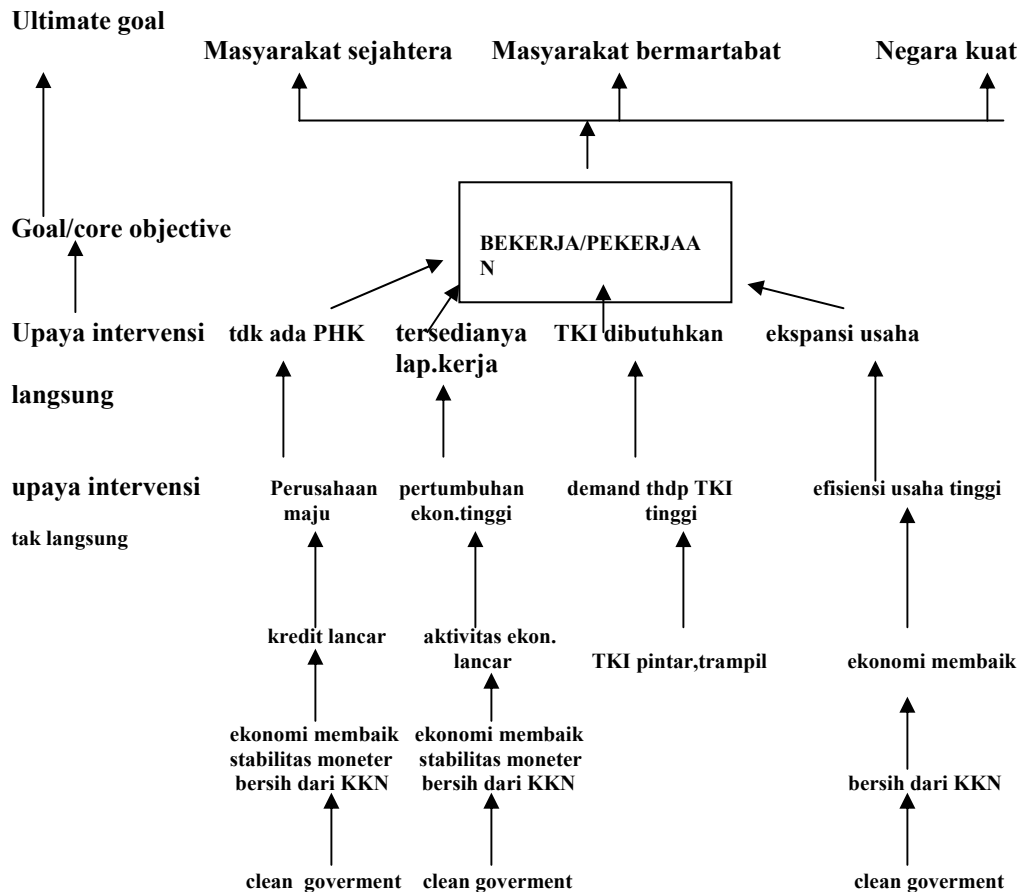
Sumber : Departemen Sosial RI . Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta, 2002.

III. Upaya Memecahkan Masalah Pengangguran

A. Analisis Pohon Tujuan (objective tree analysis) sebagai keadaan yang diinginkan (new/expected status)

Setiap orang merindukan pekerjaan karena pekerjaan adalah nafkah atau sumber hidup. Manusia pada hakekatnya tidak sekedar ingin memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan atau papan (kebutuhan fisiologis), tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kebutuhan sosial dan psikologis⁷. Bekerja(memiliki pekerjaan) tidak sekedar sebagai sumber nafkah tetapi secara psikologis merupakan lambang status seseorang dalam sebuah masyarakat. Dengan memiliki pekerjaan seseorang merasa memiliki harga diri baik di depan istri dan anak-anak atau keluarga besar maupun di masyarakat. Kalau setiap orang memiliki pekerjaan maka masyarakat akan menjadi kuat baik secara ekonomi maupun sosial . Jika masyarakat menjadi makmur maka ekonomi dan kehidupannya terberdayakan dan pada gilirannya akan menopang negara sehingga menjadi kuat.baik secara sosial, ekonomi maupun politik seperti yang tergambar pada analisis pohon tujuan(objective tree analysis) berikut ini :

⁷ Abraham Maslow menyebut 5 kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan hierarkis yaitu 1) kebutuhan akan makan, minum dan pakaian, 2)kebutuhan akan keselamatan,keamanan, 3) kebutuhan akan rasa memiliki atau sosial, 4) kebutuhan akan penghargaan dan 5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Alderfer memformulsikannya menjadi tiga dan disebutnya ERG 1) kebutuhan akan Eksistensi,2)kebutuhan akan Relatedness(hubungan) dan 3) kebutuhan akan Growth(pertumbuhan) meliputi penghargaan, aktualisasi diri



Note : Semua variable bersifat positif

Seperti terlihat pada pohon tujuan di atas, ada sejumlah elemen yang menjadi faktor penentu ada tidaknya pekerjaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung seperti 1) tersedianya lapangan kerja, 2) dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia(TKI) di luar negeri, 3) adanya ekspansi usaha, 4) adanya jaminan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Keempat elemennya dikaji satu per satu sebagai berikut

1) Ada atau tersedianya lapangan kerja disebabkan oleh adanya *pertumbuhan ekonomi* karena setiap pertumbuhan ekonomi satu persen(1%) akan memicu terserapnya 400.000 orang tenaga kerja. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maka harus ada *kegiatan atau aktivitas ekonomi* seperti adanya investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing, lancarnya distribusi barang dan jasa, majunya perdagangan luar negeri baik ekspor maupun import dll. Segala aktivitas ekonomi itu bisa berjalan manakala *kondisi perekonomian dan politik* Bangsa kita berada dalam keadaan yang normal. Secara politik harus aman karena ketidakamanan adalah suatu hal yang sensitif bagi investor terutama investor asing. Supaya roda perekonomian tetap berjalan, keseluruhan kondisi perekonomian bangsa baik makro maupun mikro harus terjamin. Dengan kata lain, membaiknya keadaan ekonomi baik Nasional, Regional maupun Internasional akan memberikan

dukungan terhadap lancarnya kegiatan usaha. Perekonomian yang baik itu ditentukan oleh berbagai indikator seperti adanya *stabilitas moneter*, terkendalinya inflasi, rendahnya bunga bank dll. Semua itu tercipta apabila negara ini bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi biang kerok hilangnya ribuan triliun uang negara. Dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), adanya *law inforcement* (penegakan hukum) adalah penentu utama dari keseluruhan kondisi itu.

2) Dibutuhkannya Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri adalah kesempatan emas terciptanya peluang untuk bekerja. Apakah negara tujuan begitu saja membutuhkan tenaga kerja kita? Tentu tidak. Adanya *permintaan yang tinggi* terhadap TKI kita tentu terkait dengan *profesionalisme, ketrampilan, sikap dan mental* dan sebagainya. Semua elemen itulah yang kita harapkan dimiliki oleh TKI kita sehingga mereka mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain.

3) Ekspansi usaha. Ekspansi usaha tidak dilakukan begitu saja. Salah satu penyebabnya adalah adanya *efisiensi dan efektivitas usaha yang tinggi*. Tatkala pengusaha melihat *peluang yang positif secara ekonomis* dari pembukaan usaha-usaha baru, maka mereka melebarkan sayapnya dengan memperluas usaha-usaha ekonomis produktifnya. Perluasan dan pembukaan usaha ini tentu akan membutuhkan diserapnya tenaga kerja baru, maka lahirlah kesempatan untuk bekerja/adanya pekerjaan bagi para penganggur. Perluasan usaha itu tidak timbul begitu saja tetapi didorong oleh kondisi ekonomi (dan politik) yang memungkinkan dibukanya usaha-usaha baru itu. Seperti dijelaskan sebelumnya membaiknya kehidupan ekonomi sebuah bangsa ditentukan oleh sejauh mana pemerintahan bangsa itu bersih (*clean government*) dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, adanya penegakan hukum, adanya sikap jujur, menghargai nilai-nilai keadilan, kebenaran dan sebagainya.

4) Adanya jaminan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja. PHK adalah suatu tindakan terakhir dari sebuah perusahaan tatkala ia dihadapkan pada tanda-tanda kemunduran. Sudah menjadi prinsip ekonomi perusahaan dimanapun di dunia ini bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja adalah salah satu tindakan penyelamat yang tidak menyenangkan demi tetap bertahannya sebuah perusahaan. Sebaliknya, apabila sebuah perusahaan itu maju, produktivitas lancar, pelanggan puas dll, maka Pemutusan Hubungan Kerja bisa dihindari. *Memiliki modal yang kuat* atau meminjam dari Bank tetapi *mampu mengembalikannya secara teratur* sudah pasti menjadi faktor penentu lancarnya sebuah usaha. Seperti dijelaskan sebelumnya, semua kondisi itu dapat tercipta jika kehidupan ekonomi suatu bangsa berada dalam keadaan yang baik dengan didukung oleh sistem pemerintahannya yang bersih, jujur, tidak bermental KKN dan sebagainya.

B. Upaya-upaya mencapai kondisi baru (new expected condition)

Seperti disampaikan sebelumnya angka pengangguran terbuka tahun 2004 meningkat menjadi 10,83 juta orang (10,32 % dari angkatan kerja). Peningkatan pengangguran terbuka ini akan terus berlanjut tahun 2005 dimana angka pengangguran terbuka diproyeksikan menjadi 11,19 juta orang atau 10,45 % dari

angkatan kerja. yang diperkirakan 4,49% (tahun 2004) dan 5,03% (tahun 2005) Data tahun 2002 yang terlihat dari tabel di halaman 2 di atas menunjukkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,13 juta orang atau 9,06% dari keseluruhan angkatan kerja. Data di atas belum termasuk setengah penganggur, yakni orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu yang jumlahnya 28,9 juta orang pada tahun 2002.

Data Tabel di atas juga menunjukkan struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan sekolah Dasar(SD) ke bawah. Untuk angkatan kerja tahun 2002 yang berpendidikan SD ke bawah mencapai 59,05 juta orang atau sekitar 58,6 % dari angkatan kerja, diikuti SMTP 17,49 juta orang, SMU 12,21 juta orang dan seterusnya (lihat tabel). Struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka yang didominasi oleh manusia Indonesia yang berpendidikan rendah ini sangat rentan terhadap konflik sosial. Keterbatasan mereka di dalam pendidikan sangat mudah dijadikan alat komoditas politik untuk melakukan berbagai konflik sosial⁸ di tengah masyarakat

Dari data statistik yang ada, hal yang juga memprihatinkan adalah terus menurunnya kesempatan kerja formal baik di perdesaan maupun di perkotaan. Jumlah pekerja formal di perdesaan yang mempunyai upah tetap (waged worker) tahun 2001 berkurang sebanyak 3,3 juta orang. Tahun 2002 jumlah pekerja formal di perkotaan berkurang 469.000 orang dan di perdesaan berkurang 1,1 juta orang. Indikator ini menunjukkan kesempatan kerja yang tercipta selama tahun 2001 dan 2002 memiliki kualitas rendah karena lebih banyak kesempatan kerja tercipta di sektor informal seperti terlihat dari gambaran tabel berikut :

Tabel 2. Status Pekerja Formal dan Informal (juta orang)

Status Pekerjaan	1997	2002
Pekerja Formal	31,7	29,2
Buruh/karyawan	30,3	26,2
Berusaha dibantu buruh tetap	1,5	3,0
Pekerja Informal	53,7	62,4
Berusaha sendiri	19,9	19,1
Berusaha dibantu anggota keluarga/buruh tak tetap	18,0	18,0
Pekerja bebas pertanian	0,0	4,2
Pekerja bebas non pertanian	0,0	3,3
Pekerja tak dibayar	15,8	17,9
Total pekerja	85,4	91,6

Sumber : Sakernas BPS, 2002.

Setelah melihat berbagai data tentang pengangguran di atas, apa yang harus dibuat untuk meminimalisasi angka pengangguran dan berbagai dampak negatifnya dalam kehidupan sosial dan politik kita di Indonesia?? Bagaimana menjembatani

⁸ Berbagai konflik sosial dan konflik horisontal di Indonesia selama ini biasanya memobilisasi para penganggur dan pelaku kejahatan yang minim pendidikan. Mereka mudah dihasut, dipengaruhi dan dijadikan alat politik apalagi dengan mengeksploitasi agama atau etnik, atau kesenjangan sosial dan ekonomi. .

(bridging the gap) antara keadaan sekarang (yakni pengangguran) dengan keadaan yang diinginkan (memiliki pekerjaan sehingga tidak menganggur)? Ada beberapa cara :

1. Membuat Kebijakan Jangka Pendek yang Realistis

Dengan melihat data bahwa pengangguran di Indonesia pada tahun 2002 ini didominasi oleh tamatan SD ke bawah (59,05 juta orang), maka perlu secepatnya diciptakan tindakan dini dalam rangka mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai masalah sosial apalagi menjelang Pemilu 2004 yang rentan terhadap konflik di tingkat masyarakat. Pengangguran yang didominasi oleh masyarakat kurang terdidik ini sangat rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai tujuan politiknya. Ada beberapa kebijakan yang bisa ditempuh :

- a. Tindakan Penyadaran (*conscient action*). Pemberian kesadaran ini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak (pemerintah, LSM, Akademisi/mahasiswa, Lembaga-Lembaga Agama dll. Upaya memberi kesadaran ini dilakukan agar kita bisa mengetahui *what they think?* (apa yang mereka pikirkan), *what they feel?* (apa yang mereka rasakan) dan *what they do?* (apa yang mereka buat). Upaya penyadaran dilakukan dengan berbagai cara seperti *socialization* (sosialisasi) di Masjid-masjid, gereja-gereja, pers dan sebagainya. Dalam rangka menciptakan efektivitas penyadaran ini, semua elemen masyarakat dilibatkan seperti Tokoh Agama, tokoh LSM, tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, Psikolog, Akademisi, tokoh politik/tokoh partai, toko adat, orang tua dan lain-lain. Proses sosialisasi ini bisa lebih efektif dilakukan juga melalui *extension education* dimana di setiap Kelurahan/Desa/RT/RW dibentuk kelompok-kelompok pembinaan dan penyadaran bagi para penganggur. Media kelompok seperti remaja masjid atau kelompok umat basis di gereja-gereja amat strategis untuk melakukan *extension education* ini. *Extension education* ini harus juga didukung oleh *capacity building* (penguatan kelembagaan). Lembaga-lembaga yang selama ini masih eksis di kelurahan/desa/RW/RT seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga Pemberdayaan Desa, Karang Taruna dll harus diperkuat fungsi dan peranannya. Lembaga-lembaga ini harus dibina secara terpadu dalam rangka mendukung keseluruhan kegiatan 'pendidikan' bagi para penganggur yang ada. Fungsionalisasi peranan lembaga-lembaga ini didukung oleh lembaga-lembaga agama, lembaga adat dan sebagainya akan sangat membantu efektivitas pelaksanaan proses penyadaran kepada 'grass-root' ini. Upaya ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan harus menjadi suatu gerakan sosial (*social movement*) yang berlaku secara Nasional. Baik pemerintah Pusat maupun daerah harus memberikan dukungan yang serius terhadap upaya penyadaran yang bersifat edukatif, psikologis dan sosial ini. Dengan mengetahui apa yang mereka pikirkan, ikut merasakan apa yang mereka alami dan rasakan serta menyelami apa yang mereka lakukan, para penganggur ini bisa dibangkitkan harga dirinya bahwa masih ada orang yang mempedulikan mereka. Sebagai pihak yang

netral, kaum akademisi/intelektual atau LSM harus menciptakan model-model penyadaran ini sebagai cara menjembatani (*bridging the gap*) keadaan yang sekarang dengan keadaan yang diinginkan. Usaha mengkomunikasikan segala hal yang bertujuan agar terbentuk *pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang positif* dalam rangka menciptakan kehidupan sosial yang baik di kalangan para penganggur kurang terdidik ini harus dibangun dalam konteks penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) itu sendiri. Berbagai cara penyadaran dengan penggunaan audio visual, slide, film, sangat membantu di dalam prosesnya sehingga tidak menimbulkan kebosanan. Metode-metode ceramah dan bersifat menggurui harus dihindari mengingat pesertanya adalah para penganggur yang kehilangan matamepencarian. Harus lebih banyak diskusi dan sharing pengalaman untuk membangkitkan gairah mereka di dalam situasi-situasi sulit menghadapi kerasnya kehidupan sebagai penganggur. Kondisi menganggur adalah kondisi dimana segala-galanya hilang dan tercabut dari seseorang, bukan saja sumber nafkah, tetapi juga recognition (pengakuan) dan harga diri. Kehilangan jati diri inilah yang membuat orang yang menganggur akan mengalami stress yang tinggi dan apabila tidak mampu dikendalikan maka akan menjadi depresi yang mengarah kepada sakit mental atau gila. Karena pertimbangan itulah maka proses penyadaran ini harus melibatkan banyak pihak termasuk para psikolog dan psikiater. Bisa saja usaha penyadaran ini bagi sebagian besar penganggur dirasakan membuang-buang waktu karena mereka harus mencari kerja untuk bisa menghidupi anak istrinya atau keluarganya. Untuk mengatasi masalah ini, maka upaya pertama (penyadaran) diikuti dengan upaya yang kedua yang lebih konkret dan realistik yakni

b. Pemberdayaan secara ekonomis dan sosial

Penyadaran melalui pembentukan sikap dan mental yang dilakukan pada tahap pertama di atas harus diikuti dengan pemberdayaan tahap kedua yang lebih bersifat ekonomis dan konkret. Kebutuhan para penganggur dan keluarganya dalam jangka pendek adalah kebutuhan akan makan dan minum. Pemenuhan kebutuhan dasar ini harus didahulukan dan menjadi perhatian utama. Karena para penganggur berpendidikan rendah ini sangat banyak maka mereka bisa disalurkan dalam kegiatan-kegiatan padat karya yang bisa mendatangkan upah bagi mereka. Bahkan menurut Bambang Widiyanto, Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas⁹, lima tahun ke depan negara ini masih harus mengembangkan industri padat pekerja dan sangat tidak mungkin beralih ke teknologi modern karena struktur angkatan kerja, pekerja dan pengangguran terbuka menurut pendidikan masih didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Tenaga-tenaga para penganggur kurang terdidik ini bisa dimanfaatkan di kegiatan-kegiatan padat karya sehingga mereka bisa mendapatkan kembali harga dirinya yang telah hilang oleh karena terkena pemutusan hubungan kerja atau karena tidak adanya ketrampilan di dalam bekerja. Pada pemberdayaan ekonomi ini

⁹ Kompas, 10 September 2003

semua elemen masyarakat juga harus ikut mendampingi mereka seperti halnya pada tahap pertama. Mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja seolah-olah ketika mereka sudah terserap dalam kegiatan/proyek yang bersifat padat karya, masalahnya telah selesai. Perlu ada pendampingan psikologis dan yang bersifat agamais serta permanen agar ketahanan mental para penganggur ini tetap baik. *Community group discussion* bisa digunakan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan mereka satu sama lain sehingga terjalin suatu komunikasi sosial di antara mereka. Dengan mereka saling mengenal satu sama lain mereka bisa saling mengontrol kelakuannya masing-masing baik di tengah lingkungan mereka sendiri maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Jadi proses penyadaran mental dan pemberdayaan sosial dan ekonomi harus berjalan bersama-sama dalam satu kesatuan kegiatan yang saling isi mengisi dan melengkapi serta berorientasi pada perubahan-perubahan sosial dan ekonomi dan berdampak pada peningkatan martabat manusia.

c. Memberikan dukungan modal kepada pekerja sektor informal

Kwik Kian Gie, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)¹⁰ mengatakan bahwa dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini, investasi yang diutamakan adalah sektor yang tidak terlalu modern dan tanpa menggunakan mesin canggih. Selama ini sektor informal dinilai sangat membantu menyerap orang-orang yang menganggur tetapi kreatif dan menjadi peredam di tengah pasar global. Namun bukan berarti sektor formal diabaikan. Jika ternyata sektor informal ternyata dapat menjawab sebagian dari masalah pengangguran yang dihadapi Bangsa kita, maka sudah waktunya sektor informal ini didukung oleh pemerintah dengan menyiapkan anggaran. Anggaran ini bisa digunakan untuk dijadikan modal pengembangan usaha ekonomis produktif bagi pekerja-pekerja informal. Kenaikan jumlah pekerja informal dari 53,7 juta orang tahun 1997 menjadi 62,4 tahun 2002 (*lihat tabel di atas*) merupakan indikasi bahwa untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia tidak bisa lagi bertumpu pada sektor formal. Apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya normal ini sangat tidak mungkin menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal. Banyaknya perusahaan/pabrik yang gulung tikar akibat krisis ekonomi yang belum pulih kurang memungkinkan terciptanya sektor formal. Kalaupun ada lapangan kerja baru untuk pekerja formal, persediaannya sangat terbatas dan kesempatan itu hanya bisa diraih oleh pekerja yang trampil, memiliki pendidikan yang memadai dan profesional serta berdaya saing tinggi.

Para pekerja informal ini harus terwadah dalam kelompok-kelompok usaha ekonomis produktif dan proses kegiatannya musti terkontrol secara rapi. Karena itu sebelum disediakannya suntikan modal baik yang berasal dari APBN maupun APBD di Daerah-daerah, fungsionalisasi peranan

¹⁰ Kompas, 10 September 2003

kelembagaan melalui penguatan kelembagaan (*capacity building*) mutlak perlu. Berbagai stakeholders seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, pekerja sosial, aparat Pemerintahan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat perlu duduk bersama untuk menyerap berbagai aspirasi guna menyusun rencana sekaligus melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomis produktif masyarakat dalam wadah kelompok yang kuat. Penguatan kelembagaan dan peranan kelembagaan itu dalam mewadahi berbagai kegiatan itu akan sangat membantu terpadu dan teraturnya proses pemberdayaan ekonomi pekerja-pekerja informal. Sebagaimana yang dialami selama ini, ada banyak masalah yang timbul dari kegiatan seperti ini seperti penyelewengan dana, korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama di tingkat pelaksana operasional. Penyelewengan itu bisa diminimalisasi apabila program ini menjadi gerakan sosial (*social movement*) dan gerakan ekonomi (*economic movement*) yang bersifat terbuka dan transparan. Seluruh masyarakat harus memantau pelaksanaannya dengan dukungan pers yang terbuka. Keterlibatan berbagai stakeholders seperti lembaga swadaya masyarakat, anggota legislatif, para akademisi dan pekerja sosial, tokoh-tokoh adat dan agama, pers, baik cetak maupun elektronik diharapkan akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan.

- d. Memberantas budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang faktanya telah menghancurkan ekonomi Negara

Pengangguran di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fenomena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian Bangsa kita secara sistematis dan menggurita terutama terjadi pada zaman Pemerintahan Orde Baru. Soeharto dipaksa turun dari kursi Kepresidenannya karena ternyata telah meluluhlantahkan Bangsa ini ke dalam jurang krisis moneter dan ekonomi. Setelah Soeharto berhasil ditumbangkan melalui gerakan ‘people power’ yang tak terbendungkan dan digantikan oleh Habibie dan kemudian Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, fenomena korupsi ini ternyata terus berlanjut. Bahkan korupsi di masa Orde Reformasi ini tidak hanya berada di Pemerintahan Pusat sebagaimana dahulu di zaman Soeharto tetapi sudah menjangkau seluruh elemen kenegaraan di Daerah-daerah. Hasil Survey Transparency International menjelang tutup tahun 2003 pada 133 Negara, Indonesia berada pada urutan **ke 122** dari 133 Negara yang paling korup. **Di dunia Indonesia tercatat sebagai negara terkorup ke enam. Di Asia Tenggara Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup.** Tabel berikut menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi(IPK) Indonesia tahun 1998-2003:

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 1998-2003

Tahun	IPK	Urutan
1998	2,0	80 dari 85 Negara

1999	1,7	96 dari 98 Negara
2000	1,7	85 dari 90 Negara
2001	1,9	88 dari 91 Negara
2002	1,9	96 dari 122 Negara
2003	1,9	122 dari 133 Negara

Sumber : Transparency International Indonesia

Untuk gambaran perbandingan¹¹ lima negara tetangga seperti **Malaysia** mendapat *IPK* 5,2, **Philipina** 2,5, **Vietnam** 2,4 dan **Papua Nugini** 2,1. Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa *IPK* Indonesia tetap tidak berubah sejak tahun 2001. Itu berarti pemerintah tidak mampu mengurangi fenomena korupsi ini. Menurut Laporan ini pula, Indonesia hanya sedikit lebih baik dari *Bangladesh*, *Myanmar*, *Nigeria* dan *Kamerun*. Jenis-jenis korupsi yang dijadikan hasil survey meliputi manipulasi uang negara, praktek suap dan pemerasan, politik uang dan kolusi bisnis. Di Indonesia, untuk kategori manipulasi uang negara **sektor yang paling korup berada di pengadaan barang dan jasa, meliputi konstruksi pekerjaan umum, perlengkapan militer dan barang jasa pemerintah**. Untuk kasus suap dan pemerasan, **korupsi terbesar terjadi di kepolisian, sektor peradilan, pajak dan bea cukai, serta sektor perizinan**. Korupsi juga terjadi di kalangan politisi (anggota DPR) dan Partai Politik, **serta dalam praktek kolusi dalam bisnis**. Untuk jenis kolusi bisnis, **korupsi terbesar terjadi di tubuh militer, kepolisian dan pegawai pemerintah lewat Koperasi dan Yayasan**.

Dari gambaran di atas, nyata bahwa tidak ada lagi suatu kebanggaan terhadap negara ini karena semua lembaga formal yang diharapkan menjadi penyelenggara negara menjadi *lokomotif* terdepan di dalam kejahatan yang luar biasa ini (*extra ordinary crime*). Korupsi terjadi di mana-mana ibarat virus kanker yang sulit diberantas dan menghancurkan sendi-sendi utama penopang keberlangsungan sebuah bangsa seperti moralitas, ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Ahli etika sosial, Prof.Dr. Magsis Suseno¹² mengatakan bahwa Bangsa Indonesia kini tinggal menunggu waktu masuk ke jurang karena korupsi bukan hanya dilakukan pejabat di tingkat pusat melainkan merata di seluruh daerah dan semua tingkatan. “Kerusakan bangsa ini hampir sempurna, hal itu antara lain karena politik uang benar-benar riil dan hampir merata dalam dunia perpolitikan di negeri ini”¹³.

Apa yang disampaikan oleh kedua tokoh agama yang terkemuka di atas terkait secara signifikan dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di

¹¹ Negara Asia yang dinilai paling rendah IPKnya adalah Singapura dengan nilai 9,4. Sedangkan negara paling bersih dari 133 Negara yang disurvei adalah Finlandia dengan IPK 9,7. IPK ini biasanya diukur pada rentangan 0 –10. Makin mendekati angka 10 berarti makin sebuah negara bersih dari korupsi, demikian sebaliknya.

¹² Berbicara dalam Seminar bertema ‘Meluruskan Jalan Reformasi’ yang diprakarsai oleh Universitas Gajah Mada, Jumat 26 September 2003 di Yogyakarta(Kompas, 27 September 2003, hal.1).

¹³ Penegasan ini disampaikan oleh Prof.Ahmad Syafii Maarif, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada kesempatan Seminar yang sama sehari sebelumnya, Kamis 25 September 2003 (Kompas, idem.)

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Otonomi Daerah di satu pihak membawa angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah khususnya Kabupaten dan Kota melalui desentralisasi kewenangan dan keuangan menyebabkan terbangunnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun daerahnya. Kewenangan dan keuangan yang sebelumnya terpusat di Jakarta telah beralih kepada daerah sehingga memungkinkan tercapainya pelayanan publik yang lebih dekat dan pendek. Akan tetapi dampak-dampak positif dari pelaksanaan Otonomi Daerah ini justru dirusak dengan kecenderungan para pejabat di daerah untuk melakukan korupsi uang negara secara besar-besaran dan dilakukan secara sistematis baik melalui peraturan-peraturan daerah yang formal maupun non formal melalui Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di antara para pelaku. Adalah sebuah fakta bahwa hampir semua pejabat di Propinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Laporan Harian Kompas, 25 Oktober 2003 secara gamblang membeberkan fakta korupsi yang dilakukan legislatif¹⁴ dan eksekutif di berbagai daerah di Indonesia, dan laporan itu hanyalah sebagian kecil dari fakta yang jauh lebih luas. APBD Propinsi Sumatra Barat tahun 2002 yang diindikasikan berbau korupsi, kolusi dan nepotisme telah menyebabkan 53 anggota DPRDnya diperiksa di pengadilan Padang; sementara itu 45 orang anggota DPRD Kota Padang sedang diusut oleh Kejaksaan Negeri. Sementara itu menurut Kemas Yahya Rahman, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, sekitar 269 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia terkait dengan kasus korupsi dan Presiden Megawati sudah memberikan izin pemeriksaan kepada 68 orang dari jumlah yang ada. Sementara itu Kejaksaan Tinggi di tujuh Propinsi sudah melakukan penyidikan atas kasus korupsi yang terkait dengan anggota DPRD tersebut yaitu Sumatra Barat 53 tersangka, Sumatra Selatan 85 tersangka, Lampung 75 tersangka, Jawa Barat 41 tersangka, DI Yogyakarta 11 tersangka, Sulut 1 tersangka dan NTB 3 tersangka. Selain itu di NTT¹⁵ 1 tersangka terkait dengan kasus korupsi (bekerja sama dengan eksekutif), Sawahlunto Sijunjung 35 orang memasuki tahap pemeriksaan. Masih segar juga ingatan kita akan kasus korupsi yang dilakukan oleh ketua dan wakil ketua DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dengan fungsi legislasi yang sangat kuat berada pada anggota DPRD ini, mereka menggunakan segala macam cara untuk melakukan korupsi baik langsung melalui manipulasi Peraturan Daerah yang terkait dengan Anggaran seperti yang terjadi di Propinsi Sumatra Barat maupun tidak langsung dalam bentuk ‘mengancam’ menolak Laporan

¹⁴ Di zaman Soeharto, korupsi lebih dominant ada pada pusat-pusat kekuasaan eksekutif. Di zaman Orde reformasi ini justru lebih dominant ada pada legislatif. Fungsi legislasi yang menonjol membuat mereka merasa berada di atas angin. Ahli politik seperti Kaplan menegaskan bahwa ada masanya sebuah negara dikendalikan oleh para bandit yang rakus, dan sebelum mereka mengakhiri jabatannya mereka akan berusaha menguras uang negara sebanyak-banyaknya.

¹⁵ laporan Pos Kupang, 20 Juni 2003.

Pertanggungjawaban Jabatan (LPJ) Bupati atau Gubernur jika tidak ‘meloloskan’ sesuatu yang berindikasi korupsi. Belum lagi para anggota DPRD itu masing-masing memiliki proyek pribadi¹⁶ dengan memanfaatkan nama kerabat, keluarga dan sebagainya seperti yang terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia.

Korupsi yang telah berlangsung secara sistematis ini telah mengakibatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, kemiskinan dan kemelaratan pada sebagian besar masyarakat Indonesia, ketidakberdayaan, pengangguran, kejahatan, konflik sosial, melebarnya gap antara orang kaya dengan orang miskin dan sebagainya yang pada gilirannya merendahkan martabat manusia. Pengangguran di Indonesia semakin tahun semakin bertambah sebagai dampak langsung kerusakan ekonomi bangsa yang salah satu sebab utamanya adalah maraknya praktek korupsi.

Apa yang harus dibuat untuk menciptakan kondisi baru yang lebih baik untuk menyelamatkan Bangsa ini?? Ada sejumlah program jangka pendek yang harus segera dibuat, antara lain:

1. Melakukan perang terhadap Korupsi. Seluruh elemen bangsa harus menyatakan tekad yang sama untuk melakukan perang terhadap korupsi. Korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) terhadap kemanusiaan karena korupsi telah menghancurkan sendi-sendi fundamental bangsa baik secara ekonomi, sosial, politik, moral dan agama maupun keamanan. Korupsi telah melahirkan ketidakadilan, merendahkan martabat manusia, menciptakan kejahatan-kejahatan sosial dan sebagainya. Gerakan melawan korupsi ini harus dikampanyekan secara terus menerus oleh berbagai elemen Bangsa melalui socialization (sosialisasi) kepada seluruh masyarakat dengan menggunakan berbagai media baik cetak maupun elektronik, melalui gerakan sosial (*social movement*) dengan melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga pemantau kekayaan pejabat negara, lembaga-lembaga pengawas non pemerintah, dan sebagainya. Juga dilakukan dengan *social mobilization* (mobilisasi sosial). Seluruh elemen masyarakat harus memantau semua gerak gerik para pejabat negara baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Masyarakat harus termobilisasi baik secara spontan maupun terencana melakukan demonstrasi, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja para penyelenggara negara dari waktu ke waktu dll.
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih dengan memilih wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD yang teruji mental, kejujuran dan komitmennya dalam membangun Bangsa. Sistem Pemilu 2004 yang

¹⁶ Di Kabupaten Manggarai Flores Barat NTT, tempat penulis berasal, para anggota DPRD masing-masing memiliki proyek. Modus operandinya, mereka mengancam kepala dinas/kepala kantor untuk meloloskan proyek-proyek tertentu. Mereka menggunakan nama kerabat, keluarga untuk mengerjakannya. Mereka mendapat sebagian dari fee proyek. Fenomena ini saya yakin juga terjadi di daerah-daerah lain apalagi menjelang Pemilu dimana partai2 politik membutuhkan uang untuk kampanye.

memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakilnya dan kemudian Gubernur dan Bupati secara langsung adalah kesempatan kita menciptakan pemerintahan yang bersih. Seluruh rakyat harus diberi penyadaran untuk memilih wakil-wakilnya yang bersih dari tindakan-tindakan tak terpuji itu. Cara yang mungkin mengkomunikasikan program ini adalah melalui *campaign*(kampanye), Seminar, diskusi, simposium, *community group discussion*, publikasi baik melalui pers cetak maupun elektronik dan sebagainya.

2. Membuat Kebijakan Jangka Panjang melalui desentralisasi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi ke daerah-daerah

Sejalan dengan Otonomi Daerah, desentralisasi pertumbuhan ekonomi harus dipindahkan dari Pusat ke Daerah, dari Jawa ke luar Jawa, dari daerah/wilayah yang padat industri ke daerah yang tidak padat industri sehingga bisa menekan angka urbanisasi dari Desa ke Kota, atau dari daerah yang 'tidak bergula' ke daerah atau wilayah yang 'bergula'. Selama ini sentra-sentra pertumbuhan ekonomi hanya berpusat di Jakarta sehingga orang dari seluruh wilayah di Indonesia ini ramai-ramai mengais rejeki di Jakarta. Jika pabrik-pabrik, industri, perusahaan-perusahaan berskala nasional atau Internasional dibangun juga di daerah-daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi di daerah/wilayah itu. Begitu terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan menciptakan penambahan tenaga kerja baru. Agar investor menanamkan modalnya di daerah-daerah, berbagai infrastruktur, komunikasi, transportasi harus dibangun sebagaimana halnya di Jawa atau daerah-daerah/wilayah yang memiliki peluang pertumbuhan ekonomi tinggi. Cara mengkomunikasikan program ini adalah melalui workshop, seminar, simposium yang bisa mempengaruhi pengambil keputusan di tingkat atas; juga melalui wakil-wakil rakyat di DPR dengan menyalurkan aspirasi ini kepada mereka. Atau melalui pembentukan opini publik di media massa secara terus menerus, melalui *lobby*, *bargaining* dan sebagainya.

IV. Kesimpulan dan Penutup

Pengangguran di Indonesia yang telah mencapai puluhan juta orang merupakan suatu masalah yang mendesak yang harus segera dipecahkan karena dampak pengangguran itu akan sangat berbahaya bagi tatanan kehidupan sosial. Adalah fakta bahwa berbagai kejahatan sosial seperti pencurian/penodongan/perampokan, pelacuran, jula beli anak, anak jalanan dan lain-lain merupakan dampak dari pengangguran. Dilihat dari dampaknya yang luas terhadap tatanan kehidupan sosial, pengangguran telah menjadi kuman penyakit sosial yang relatif cepat menyebar, berbahaya dan beresiko tinggi menghasilkan korban sosial yang pada gilirannya menurunkan kualitas sumber daya manusia, martabat dan harga diri manusia. Karena itulah maka melalui strategi komunikasi pembangunan, kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis mutlak dilakukan agar angka pengangguran dapat ditekan/dikurangi.

Dengan kebijakan yang langsung menyentuh permasalahan pengangguran, maka penyebab dari berbagai patologi sosial yang dialami masyarakat saat ini dapat

dikurangi. Berbagai masalah sosial perkotaan yang meresahkan masyarakat saat ini berakar dari kesulitan hidup atau kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh ketiadaan sumber hidup(pekerjaan).

DAFTAR PUSTAKA

1. Conyer Diana, 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
2. John Naisbit dan Patricia A. Delapan Jalan Menuju Perubahan. Gramedia, 1993.
3. Jelamu Ardu Marius. Dilema Pembauran Golongan Minoritas Cina. Studi Kasus di Kupang NTT. Tesis, Pascasarjana UI, 1999.
4. Harian Kompas, 25 Oktober 2003.
5. Harian Kompas, 10 September 2003
6. Harian Kompas, 27 September 2003.
7. Harian Pos Kupang, 20 Juni 2003.
8. Suarapublika, Novermber 2003.
9. Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999

